

TATA KELOLA PENDIDIKAN : STUDI TENTANG GERAKAN AYO SEKOLAH DI KABUPATEN BOJONEGORO DILIHAT DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DAN SOUND GOVERNANCE

Emi Nurfadlilah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Come to School Movement became one of the steps taken by Bojonegoro District to handle problems of education. One of the problems in the education sector is dropout rates have remained high. This movement as an attempt to address these problem as well as increasing school participation. Management education become important to discussed because there are still many the assumption that governance not good enough. Governance less well it will affected a lot of sectors, one of them is education. Manajement education less well it would provoke gap between the objectives to the achieved by the fact that accoured in field. The purpose of this study is aims to look at Come to School Movement in Bojonegoro District seen from the perspective of good governance and sound governance. The type of research used in this study is a type of descriptive research with qualitative approaches. The selection of informants using purposive sampling and snowball sampling. Data collection is carried out by means of interviews, observation, documentation, and a written document. Data analysis using data reduction techniques, presentation of data, and verification or withdrawal of the conclusion. The result of the research shows that the management in Come to School Movement when seen from perspective of good governance still needs to be improved in the principle of the rule of law, transparency, effectiveness and efficiency. Whereas if viewed from the perspective of sound governance still needs to be improved in dimension of the cognition and value and also constitution.

Keywords: good governance, sound governance, education

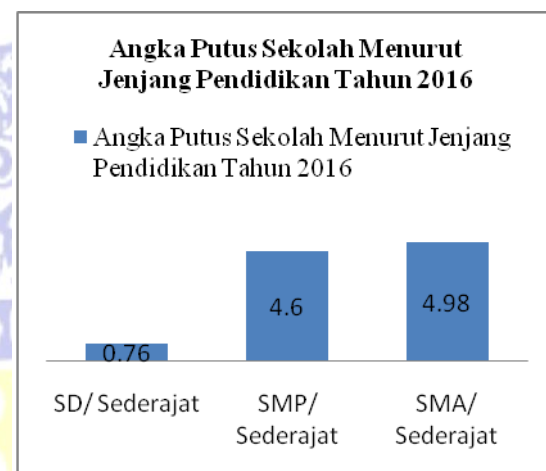
PENDAHULUAN

Jumlah penduduk di Indonesia saat ini sekitar 250 juta jiwa, sebagian besar berada pada usia produktif (15-64 tahun). Perbandingan dimana penduduk usia produktif lebih besar dari pada penduduk non produktif menyebabkan angka ketergantungan menurun dan memberikan peluang yang disebut bonus demografi. Bonus demografi ini membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun juga akan berdampak sebaliknya jika tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Salah satu acuan untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat *Human Development Index (HDI)* atau *Indek Pembangunan Manusia (IPM)*. Menurut laporan *United Development Program (UNDP)* tahun 2014 indek pembangunan manusia Indonesia berada pada peringkat 110. Masih dibawah negara Asean lain seperti Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Itu menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

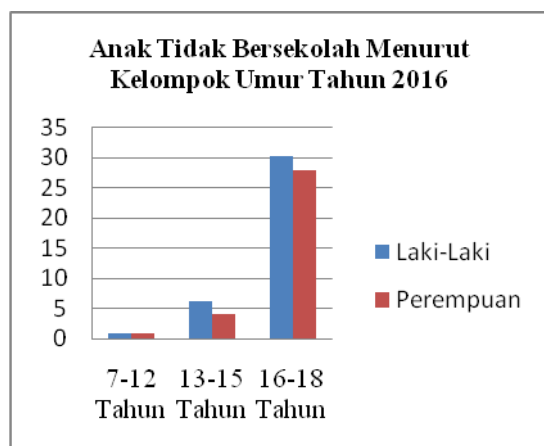
Fokus pembangunan pendidikan Indonesia saat ini adalah berupaya untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun baik melalui pendidikan formal maupun nonformal serta mencegah anak putus sekolah dan menarik anak yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah lagi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu

upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : BPS, Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2016

Data diatas adalah angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2016, seperti yang ditampilkan dalam data tersebut jumlah putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula angka putus sekolah. Pada jenjang SD/ sederajat angka putus sekolah masih pada kisaran 0,76 persen, sedangkan pada jenjang SMP/ sederajat meningkat menjadi 4,6 persen dan meningkat lagi pada jenjang SMA/ sederajat menjadi 4,98 persen.



Serta dari data diatas dapat disimpulkan bahwa anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah jumlahnya sangat rendah yaitu laki-laki 0,95 persen dan perempuan 0,88 persen. Sedangkan pada anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah laki-laki sebesar 6,18 persen dan perempuan 4,02 persen. Dan anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah sangat tinggi yaitu laki-laki sebesar 30,38 persen dan perempuan 27,89 persen. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak Indonesia yang tidak bersekolah terutama pada anak kelompok umur 16-18 tahun.

Banyak faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dan tidak bersekolah lagi. Diantaranya karena tidak ada biaya, bekerja, menikah dan sebagainya. Banyak dari masyarakat yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena terbentur biaya dan pada akhirnya memilih untuk bekerja demi membantu keuangan keluarga. Dengan pendidikan yang seadanya bahkan belum sampai lulus SMA/ sederajat mereka akan kesulitan bersaing dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Karena kurangnya keterampilan maupun tidak memenuhi persyaratan minimal yang dibutuhkan.

Selain itu besaran anak yang mengenyam pendidikan pada tingkat satuan tertentu juga dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah ini merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah mengalami penurunan pada tiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin kecil pula angka partisipasi sekolahnya. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengalami hal tersebut adalah Kabupaten Bojonegoro.

Jika membahas mengenai pendidikan tentunya tidak akan terlepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa IPM digunakan sebagai salah satu alat ukur kualitas sumber daya manusia. Indikator didalamnya meliputi aspek pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 masih cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Kabupaten

Bojonegoro berada pada urutan ke 26 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Masih pula berada dibawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Berikut adalah rincian data IPM Kabupaten Bojonegoro mulai tahun 2010 sampai 2016

Tabel 1.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2016

Tahun	IPM	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran
2010	62,19	69,8	11,14	5,51	8086,59
2011	63,22	69,89	11,43	5,7	8413,29
2012	64,2	69,98	11,74	5,8	8809,44
2013	64,85	70,07	12,04	5,9	8934,19
2014	65,27	70,11	12,08	6,14	8963,65
2015	66,17	70,51	12,09	6,64	8993,21
2016	66,73	70,67	12,11	6,65	9420

Sumber : BPS diolah

Pada era otonomi daerah memungkinkan daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Ada banyak urusan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya adalah urusan tentang pendidikan. Peran pemerintah sangat penting bukan hanya menyediakan sarana prasarana pendidikan tapi juga dalam meningkatkan partisipasi warga untuk menempuh pendidikan.

Fokus pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini yang berupaya untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun serta mencegah anak putus sekolah dan menarik anak yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah lagi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah yang berupaya melalui berbagai program agar wajib belajar 12 tahun dapat terlaksana serta berupaya agar anak yang putus sekolah dapat bersekolah lagi. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan disadari penting oleh Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro mulai tahun 2015 melaksanakan program dalam bidang pendidikan berupa Gerakan Ayo Sekolah. Program ini sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya pemerintah melaksanakan wajib belajar 12 tahun, anak usia sekolah menempuh pendidikan formal dan yang diluar usia sekolah menempuh pendidikan nonformal. Ini merupakan bentuk nyata dari upaya agar partisipasi sekolah masyarakat meningkat dan angka putus sekolah menurun serta menarik kembali anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Karena pemerintah Kabupaten

Bojonegoro yakin dengan meningkatkan pendidikan maka akan meningkat pula kualitas dan daya saing masyarakat. Program ini menjadi penting sebagai pemicu agar masyarakat mau untuk melanjutkan pendidikan lagi.

Pengelolaan pendidikan menjadi penting untuk dibahas karena masih banyaknya anggapan bahwa tata kelola pemerintah masih kurang baik. Tata kelola pemerintah yang kurang baik ini akan berdampak pula pada bidang-bidang yang dinaunginya, salah satunya adalah pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang kurang baik ini akan menimbulkan gap antara tujuan yang ingin dicapai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Tata kelola pendidikan ini sendiri meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengelolaan pendidikan ini dapat dianalisis menggunakan dua perspektif yang berbeda yaitu perspektif *good governance* dan *sound governance*. Kedua perspektif ini digunakan sebagai acuan mengenai baik tidaknya tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dapat pula digunakan sebagai alat analisis tata kelola pendidikan terutama yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Perspektif yang diambil dalam penelitian ini adalah perspektif *good governance* dan perspektif *sound governance*. Perspektif yang pertama yaitu perspektif *good governance* diambil karena *good governance* menjadi salah satu tolok ukur yang digunakan untuk melihat tata kelola pemerintah yang dianggap baik selama ini. Semenjak pertama kali konsep ini diperkenalkan, konsep ini menjadi sangat fenomenal dan ada pada setiap hal yang menyangkut tata kelola pemerintah. Aktor yang berperan dalam *good governance* diantaranya pemerintah (negara), swasta dan masyarakat. *Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara ketiganya. Ini sesuai dengan program Gerakan Ayo Sekolah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bojonegoro yang melibatkan ketiga aktor tersebut, serta adanya hubungan yang saling berkaitan antara ketiganya.

Perspektif kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif *sound governance*. *Sound governance* masih sangat awam dan jarang sekali digunakan dalam mengkaji tata kelola pemerintah di Indonesia. Sebenarnya *sound governance* ini adalah kritik dari *good governance*. Namun selain mengkritik kekurangan dari *good governance*, *sound governance* juga merekonstruksinya dengan memberikan solusi nyata. *Sound governance* menambah satu aktor lagi yang berperan dalam jalannya tata kelola yaitu aktor internasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa elemen internasional ini juga memiliki pengaruh dalam pengelolaan pemerintah. Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir ini mulai berkembang seiring

dengan ditemukannya sumber minyak bumi. Eksploitasi terhadap sumber minyak ini memunculkan banyaknya multinational corporation yang mulai berkembang di Kabupaten Bojonegoro. Tentunya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itulah perspektif *sound governance* digunakan dalam penelitian ini karena dengan pertimbangan bahwa ada elemen internasional yang mungkin dapat mempengaruhi kebijakan di Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten dan kota yang menjalin kerjasama dengan organisasi internasional salah satunya adalah *Open Government Partnership*. Sehingga ada kemungkinan bahwa kerjasama tersebut juga berpengaruh pada jalannya tata kelola yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu konsep *sound governance* diambil menjadi perspektif kedua dalam penelitian ini. dengan pertimbangan kemungkinan adanya pengaruh aktor internasional pada program-program di Kabupaten Bojonegoro.

Program Gerakan Ayo Sekolah akan dianalisis menggunakan dua perspektif yang berbeda yaitu *good governance* dan *sound governance*. Keduanya memiliki perbedaan mulai dari latar belakang dan perkembangannya, aktor yang terlibat didalamnya, serta prinsip dan dimensi yang menyertainya. Hasil analisis tersebut akan melihat bagaimana kedua perspektif tersebut digunakan untuk melihat satu fenomena yang sama yaitu tata kelola dalam Gerakan Ayo Sekolah. Penelitian ini menjadi penting sebagai pelengkap dalam studi tata kelola terutama yang berfokus pada bidang pendidikan. Sudut pandang yang diambil dalam penelitian ini bukan cuma satu tetapi dua perspektif yang berbeda yaitu *good governance* dan *sound governance*. Penelitian ini akan menyajikan perbedaan dari dua perspektif tersebut jika digunakan untuk melihat suatu fenomena yang sama. Sehingga penelitian ini juga dapat memperkaya studi-studi mengenai tata kelola pemerintah terutama pada tata kelola pendidikan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dituliskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tata kelola Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro dilihat dari perspektif *good governance* dan *sound governance*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tata kelola Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro dilihat dari perspektif *good governance* dan *sound governance*

Secara akademis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap pengembangan konsep tata kelola pemerintah terutama dalam hal tata kelola pendidikan serta dapat dijadikan rujukan bagi akademisi untuk pengembangan lebih lanjut pada masa yang akan datang. Pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus dengan melihat tata kelola pendidikan terutama Gerakan Ayo Sekolah di

Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017

Kabupaten Bojonegoro dilihat dari perspektif *good governance* dan *sound governance*. Sehingga dalam penelitian ini tidak hanya melihat dari satu perspektif saja namun dua perspektif yang berbeda yaitu *good governance* dan *sound governance*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan informasi kepada pihak-pihak terkait khususnya kepada penyelenggara dan pengelola program Gerakan Ayo Sekolah dengan melihat pada perspektif *good governance* dan *sound governance*. Sehingga dapat dijadikan sebagai refleksi bagi pelaksana program Gerakan Ayo Sekolah ini apakah telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Serta melalui perspektif *good governance* dan *sound governance* yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang pelaksanaan program Gerakan Ayo Sekolah apabila dilihat dari dua perspektif tersebut.

Tinjauan Teori Good Governance

OECD dan *World Bank* mengartikan *Good governance* penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedarmayanti 2009).

Arti *good* dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung pemahaman

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan. Pemerintahan yang baik tergantung pada dua hal :
 - 1) Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara; orientasi ideal negara mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen konstituen/pemilihnya
 - 2) Pemerintahan berfungsi ideal: secara efektif, efisien melakukan upaya pencapaian tujuan bernegara

Lembaga administrasi negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Pengertian *good governance* juga dikemukakan oleh Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin yang diartikan sebagai pengguna otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Robert Charlick mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/ atau kebijakan yang abash demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan (Pandji Santosa 2008)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan sinergitas antara negara, sektor swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di suatu negara.

Prinsip-prinsip Good governance

- a. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of Law*. Adanya jaminan kepastian hukum dan rasa adil dari penerapan hukum yang berlaku untuk setiap warga negara tanpa pandang bulu. Setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada pihak lain mengenai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu berupa kebijakan, program, proyek dan sebagainya.
- d. *Responsiveness*. Pemerintah harus mampu untuk merespon kebutuhan masyarakat terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dasar dan HAM. Ini menuntut kepekaan para aktor dalam pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholder”
- e. *Consensus Orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. Apabila terdapat perbedaan kepentingan yang mendasar dalam masyarakat maka akan

- diselesaikan melalui diskusi/ musyawarah menjadi konsensus.
- f. *Equity*. Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali dapat terlibat dalam proses politik. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
 - g. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
 - h. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga “stakeholder”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
 - i. *Strategic vision*. Para pemimpin publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan dalam pembangunan semacam ini.

Sound Governance

Konsep *sound governance* menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik konstitusional, organisasi, administratif, manajerial dan etika, tapi juga jelas secara internasional/ global dalam interaksinya dengan negara-bangsa lain dan dengan bagian pemerintahannya dalam cara yang independen dan mandiri. *Sound governance* merefleksikan fungsi governing dan administratif dengan kinerja organisasi dan manajerial yang jelas, kompeten, antisipatif, responsif, akuntabel, dan transparan serta kolektif dan berorientasi strategis baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Tjahjanulin Domai 2011).

Konsepsi *good* ini digantikan dengan *sound* karena “*soundness is used to characterize governance with superior qualities in functions, structures, process, values, dimensions and element that are necessary in governing and administration*”(Ali Farazmand 2004). Artinya konsep “*soundness*” ini menggambarkan *governance* dengan kualitas unggul dalam fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi dan elemen yang dibutuhkan dalam *governing* dan administrasi.

Dimensi-dimensi Sound Governance

- a. Proses. *Sound governance* berisi sebuah proses mengatur segala interaksi segala elemen atau stakeholder yang terlibat. Elemen atau stakeholder yang dimaksud adalah negara, swasta, masyarakat sipil dan tentunya elemen internasional. Dimensi ini ingin mencermati

- bagaimana proses interaksi dari keempat elemen tersebut. Tapi *sound governance* bukanlah menyangkut tentang proses internal dan eksternal, tetapi juga tentang struktur dari proses itu sendiri.
- b. Struktur. Proses berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bekerja, sedangkan struktur menunjuk dan memandu arah pada proses tersebut. Arahan ini mencakup seluruh sistem maupun elemen dalam tata pemerintahan. Sehingga akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur sendiri dapat diartikan sebagai sebuah badan elemen konstitutif, actor, aturan, regulasi, prosedur, kerangka pembuatan keputusan, dan sumber otoritatif yang bisa memberikan sanksi atau melegitimasi proses *governance*. Wujud strukturalnya dibentuk dan dijalankan secara vertical dan horizontal, dan dipengaruhi oleh beragam faktor dan kekuatan internal dan eksternal, local dan internasional.
 - c. Kognisi dan nilai. Dimensi kognisi atau nilai merepresentasikan sistem nilai unik dalam struktur atau proses *governance*. Internalisasi nilai-nilai yang ada harus diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya nilai tersebut sehingga menjadi sebuah kebutuhan dan bukan sebuah keterpaksaan. *Sound governance* berupaya untuk membuat nilai yang sehat dan dinamis yang akan mendasari dimensi struktur dan proses. Nilai normative keadilan, ekuitas, representasi integritas, responsivitas, tanggungjawab, toleransi dan kesetaraan dihadapan hukum bagi semua rakyat tanpa melihat warna, ras, etnis, gender, dan umur, membentuk lem perekat sebuah sistem *sound governance* yang menjaga semua dimensi lain tetap saling berkaitan dalam cara yang kuat.
 - d. Konstitusi. Konstitusi adalah dokumen dasar yang menjadi cetak biru dari *governance*. Meski begitu, dalam sistem *governance* yang lemah, kurang terorganisasi dan tidak jelas konstitusi tidak lebih sekedar dokumen formal, ini masih sering diabaikan, dan hanya digunakan secara selektif untuk melayani kepentingan tertentu. Formalisme terjadi ketika aturan dan regulasi formal dilengkapi oleh norma dan perilaku informal dan tidak resmi dalam politik, tata pemerintahan, dan administrasi untuk melayani tujuan khusus, tetapi mereka diaplikasikan secara kaku. Konstitusi dalam *Sound governance* tidak diposisikan dalam konteks tersebut. Tingginya kadar formalisme bisa merusak legitimasi sistem. Sebuah konstitusi bisa menjadi sumber legitimasi yang paling penting dalam sistem *governance*, sebuah konstitusi juga mendukung kejelasan *governance* di level nasional.
 - e. Organisasi dan institusi. Organisasi dan institusi merupakan alat yang harus dimiliki untuk

mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. *Sound governance* tidak memiliki patokan tentang organisasi dan institusi yang baik atau buruk. Karena semua itu bersifat kontekstual dan tergantung kondisi juga tujuan dari organisasi dan institusi tersebut. Organisasi adalah wujud konkret dari institusi. Institusi berisi tugas-tugas dan alasan kenapa organisasi tertentu diperlukan. Institusi adalah jiwa dan organisasi adalah tubuhnya. Tanpa adanya institusi maka tidak akan ada *Sound governance* dan institusi tanpa organisasi akan rapuh.

- f. Manajemen dan kinerja. Ini adalah bagian integral dari sistem keseluruhan. Manajemen merupakan cara organisasi mengatur hidup dan mengekspresikan dirinya. Antara satu organisasi dengan organisasi yang lain memiliki manajemen yang berbeda walaupun institusinya sama. Manajemen ini diharapkan dapat mengantarkan organisasi pada dampak yang diinginkan. Kinerja merupakan alat ukur utama untuk melihat kualitas manajemen dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Maka dari itu, manajemen perlu didukung oleh ilmu pengetahuan, teknologi, sumberdaya, kapasitas, dan keahlian terbaru melalui penelitian, pelatihan dan pengembangan serta peningkatan dan pembentukan kapasitas. Tanpa sistem manajemen yang jelas seperti yang dikarakterkan oleh efisiensi dan efektivitas, *sound governance* kehilangan kompetensi, menghasilkan kinerja buruk, sampah dan duplikasi, biro-patologi dan kekurangan legitimasi.
- g. Kebijakan. Dimensi kebijakan dalam *sound governance* memberikan panduan, arahan dan kendali yang jelas bagi elemen atau dimensi proses, struktur dan manajemen. Ada dua tipe kebijakan yaitu kebijakan eksternal dan kebijakan internal. Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diangkat dari aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang nantinya akan digunakan sebagai arahan bagi organisasi. Sedangkan kebijakan internal adalah kebijakan organisasi atau panduan kepada peran yang mendefinisikan dan menetapkan aturan, regulasi, prosedur dan nilai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan eksternal dan internal ini menjadi kendali bagi kinerja organisasi. Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan tersebut. Semakin banyak partisipasi masyarakat maka semakin besar pula kredibilitas dan legitimasi yang diberikan. Partisipasi dalam *Sound governance* bukan hanya sekedar melibatkan masyarakat namun juga mendorong terjadinya partisipasi tersebut. Selain partisipasi, transparansi juga diperlukan agar

masyarakat dapat melakukan evaluasi secara tidak langsung terhadap kebijakan yang dibuat.

- h. Sektor. Dimensi sektoral dari *sound governance* dikatakan penting karena difokuskan pada sektor spesifik seperti industri, pertanian, desa, kota, ilmiah, penelitian dan pengembangan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan area lainnya. *Sound governance* sektoral membutuhkan partisipasi langsung dari rakyat, manajemen yang mampu, dan pengetahuan dan keahlian dalam kinerja organisasi publik. Tapi koordinasi, kerjasama, dan pembagian pengetahuan dan informasi antar sektor dan organisasi dikatakan sebagai bahan penting dari *sound governance*
- i. Kekuatan internasional atau globalisasi. Saat ini dijamin cepatnya globalisasi dan keterkaitan global, negara-bangsa, pemerintah dan rakyat masuk ke dalam-baik sukarela atau dipaksa- rejim yang tidak toleran dengan perilaku *governance* apapun yang sebelumnya dianggap normal dan internal dalam pemerintah berdaulat, atau menuntut diimplementasikannya aturan, regulasi dan protokol yang disepakati bersama di level regional atau global.
- j. Etika, akuntabilitas, dan transparansi. Fitur pokok dari *sound governance* adalah pondasi pokok dari nilai etika, kebutuhan akuntabilitas, dan struktur dan nilai transparansi. Prinsip kardikal tentang cek *governance* untuk menghindari prinsip buta efisiensi dan ekonomi murni dalam proses manajemen dan administrasi.

Tata Kelola Pendidikan

Tata kelola atau pengelolaan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya baik manusia atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tata kelola pendidikan merupakan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan yang ada. Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari penyampaian layanan pendidikan yang efektif dapat menjadi titik awal untuk mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan.

Menurut Bank Dunia (2013) tata kelola pendidikan dipecah menjadi empat dimensi utama untuk mengukur tingkat efektivitas institusi pemerintah daerah yang melekat dengan penyelenggaraan layanan pendidikan, juga disertakan dengan tujuan untuk mengukur kinerja pendidikan daerah secara keseluruhan. Dimensi yang digunakan dalam mengukur tata kelola pendidikan diantaranya

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Upaya dan tindakan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendorong pengelolaan sektor pendidikan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan partisipatif

2. Sistem Pengendalian Manajemen
Mengukur taraf sampai dimana sistem yang ada akan menyertakan keputusan-keputusan yang dibuat pada proses perencanaan tingkat daerah dan sekolah ke dalam rencana kerja pendidikan tahunan tingkat daerah
3. Sistem Informasi Manajemen
Mengukur ketersediaan informasi yang berkualitas pada sistem pendidikan daerah yang dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan dan pemantauan pendidikan
4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Menentukan apakah sistem yang ada dapat merencanakan, menganggarkan dan memantau penggunaan sumber daya secara efektif
5. Standarisasi Layanan Pendidikan
Setiap layanan pendidikan selalu memiliki standar pendidikan yang sama baik standar pendidikan secara nasional maupun standar pendidikan minimal

Tata Kelola Pendidikan dilihat dari perspektif *Good Governance*

Pengelolaan pendidikan dapat dilihat dari sudut pandang *good governance*. Dengan melihat dari perspektif *good governance* maka aktor yang terlibat di dalamnya hanya meliputi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Ketiga aktor ini merupakan aktor yang selalu terlibat dalam setiap tata kelola pemerintah baik pusat maupun daerah. Ketiganya memiliki peran tersendiri yang saling melengkapi satu sama lain.

Setiap organisasi memiliki tantangan-tantangan tersendiri untuk untuk membawa organisasi kearah yang lebih baik. Untuk menghadapi tantangan-tantangan atau permasalahan tersebut maka perlu adanya pengelolaan yang tepat. Salah satu pengelolaan dalam bidang pendidikan akan dilihat dari prinsip *good governance* yang telah dijelaskan diatas. Prinsip-prinsip itu meliputi transparansi, *rule of law*, partisipasi, responsivitas, berorientasi consensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Tata kelola pendidikan dianggap baik apabila memenuhi kriteria dari kesembilan prinsip tersebut.

Tata Kelola Pendidikan dilihat dari perspektif *Sound Governance*

Pengelolaan pendidikan dilihat dari perspektif ini maka pengelolaan pendidikan yang baik melibatkan empat aktor yaitu pemerintah, swasta, masyarakat dan ditambah elemen internasional. Pada hubungan tata kelola pendidikan dengan perspektif *sound governance* elemen internasional ini sedikit banyak mulai berpengaruh terhadap pengelolaan di pemerintah. Akan

diketahui lebih dalam bagaimana pengaruhnya dan seberapa besar peranannya. Karena sering kali dalam pengelolaan pendidikan elemen internasional ini dianggap kasat mata.

Pada perspektif *sound governance* ini nantinya tata kelola pendidikan akan dilihat melalui sepuluh dimensi, diantaranya proses, struktur, kognisi dan nilai, konstitusi, organisasi dan instansi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, elemen internasional atau globalisasi, serta etika, akuntabilitas dan transparansi. Sehingga akan diperoleh hasil berupa pengelolaan pendidikan dengan melibatkan aktor internasional dengan analisis sepuluh dimensi tersebut.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan dokumen tertulis. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Pada penelitian ini akan menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu peneliti akan membandingkan dan meninjau kembali data yang sudah diperoleh sebelumnya baik berupa dokumen, berita maupun hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Pendidikan dilihat dari *Good governance*

a. Partisipasi

Aktor dalam Gerakan Ayo Sekolah ini melibatkan banyak pihak, baik dari pihak pemerintah sendiri yang dalam hal ini dinas pendidikan, kecamatan, desa dan masyarakat. Pada pelaksanaan Gerakan Ayo Sekolah ini juga turut melibatkan masyarakat, misalnya pada pendataan anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Selain keterlibatan masyarakat secara langsung, pihak RT pada masing-masing desa juga berperan sebagai perwakilan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat sendiri dapat dikatakan baik, dimana masyarakat terlibat dalam hal pendataan, memberikan motivasi dan informasi.

b. Rule of law

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Gerakan Ayo Sekolah berasal dari UUD 1945 pasal 31, Undang-undang Pendidikan Nasional, Perda Pendidikan serta Keputusan Bupati atau Edaran Bupati. Namun ketiganya masih belum dapat menjelaskan mengenai detail

Perda maupun Keputusan Bupati yang membahas mengenai Gerakan Ayo Sekolah. Adapun perda yang akan membahas mengenai Gerakan Ayo Sekolah masih dalam tahap penyusunan. Sehingga ini membuat Gerakan Ayo Sekolah kurang memiliki kekuatan hukum yang jelas.

c. Transparansi

Banyak informasi yang sudah dapat diakses di website dinas pendidikan atau pun internet. Sehingga untuk kemudahan akses informasi sudah dapat dikatakan baik. Sedangkan dalam hal kelengkapan informasi data-data pendukung mengenai pendidikan sudah bisa diakses termasuk juga anggaran. Akses informasi tidak hanya pada lingkup pemerintah kabupaten atau dinas pendidikan, akses informasi juga bisa didapatkan secara langsung dari desa. Desa sendiri juga memiliki papan monografi yang menunjukkan informasi umum dari desa dan juga terdapat poster yang berisi anggaran desa setiap tahunnya. Selain itu desa juga memiliki website yang bisa diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu kemudahan akses informasi dari desa dapat dikatakan sudah baik. Sedangkan untuk kelengkapan informasi yang masih sebatas kapasitas desa sudah.

d. Responsiveness

Gerakan Ayo Sekolah ini merupakan salah satu bentuk respon pemerintah akan kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan. Masih banyaknya anak yang putus sekolah menjadi pertimbangan dasar dijalkannya Gerakan Ayo Sekolah. Sehingga apabila dikaitkan dengan kemampuan pemerintah untuk merespon kebutuhan dasar dan HAM ini sudah baik. Pendidikan sendiri merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali dan pemerintah wajib untuk membiayainya, serta saat ini pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Ini juga sebagai salah satu wujud kepekaan dari para aktor dalam pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat.

e. Consensus Orientation

Cara penyelesaian masalah atau perbedaan kepentingan dilakukan dengan rapat atau musyawarah yang dibagi berdasarkan tingkatannya. Setiap tingkatan akan berbeda pihak yang terlibat didalamnya. Apabila perbedaan kepentingan berada ditingkat daerah atau kabupaten maka pihak yang dilibatkan dalam rapat adalah divisi yang bersangkutan dan pemerintah kabupaten. Selain itu dinas pendidikan sebagai perantara apabila terdapat berbagai kepentingan.

Pada tingkatan yang lebih rendah yaitu desa atau RT pihak yang terlibat juga berbeda. apabila terjadi perbedaan kepentingan pada tingkat RT maka akan diselesaikan dengan

musyawarah RT yang dilakukan setiap bulan sekali. Jika dalam musyawarah tersebut masih tidak bisa memperoleh keputusan yang diinginkan maka pihak desa sendiri yang nantinya akan turun tangan.

f. Equity

Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama tanpa pengecualian dan pemerintah harus menjaminkannya. Termasuk juga pada Gerakan Ayo Sekolah ini, semua masyarakat Bojonegoro memiliki hak yang sama untuk terlibat dan memperoleh manfaatnya.

Dilihat dari teori mengenai *equity*, pengelolaan Gerakan Ayo Sekolah ini pada pelaksanaannya sudah sesuai. Semua warga Bojonegoro memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan, sesuai dengan amanat UUD 1945. Disebutkan juga selain memperoleh hak yang sama dalam bidang pendidikan, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk ikut serta mendukung terselenggaranya Gerakan Ayo Sekolah. Pemerintah sebagai penyelenggara juga berupaya untuk mendorong agar masyarakat memperoleh haknya.

Prinsip *equity* atau keadilan ini juga diwujudkan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan. Semua siswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh bantuan pendidikan tanpa memandang baik kaya ataupun miskin. Meskipun besaran yang diterima pada tahun 2017 ini mengalami perubahan, dari yang awalnya sama rata antara yang kaya dan miskin, sekarang berubah. Anak PNS antara golongan I, II, III, IV, TNI/ Polri sudah dibedakan dengan warga yang biasa. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, penyaluran dana pendidikan ini masih bisa dikatakan adil karena semuanya tetap memperoleh bantuan pendidikan.

g. Effectiveness and Efficiency

Pada Gerakan Ayo Sekolah ini sudah banyak menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jika dilihat dalam pelaksanaan Gerakan Ayo Sekolah ini proses dan lembaga yang dalam hal ini dinas pendidikan sudah sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Sumber daya tersebut diantaranya sumber daya manusia dan teknologi. Namun dalam pemanfaatan sumber daya pengetahuan atau keterampilan pada kenyataan dilapangan dirasa masih kurang. Dalam menjalankan website yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak pegawai di desa yang tidak mampu untuk mengoperasionalkannya. Sehingga untuk pengoperasionalnya masih terbatas kemampuan pegawai.

h. Accountability

Pengelola pendidikan dianggap akuntabel apabila dapat mempertanggungjawabkan segala perbulatan, sikap, dan sepak terjang keseluruhan atas apa yang telah dilakukan secara objektif kepada pihak yang memberi kewenangan. Bentuk pertanggungjawaban mengenai proses pendataan yang melibatkan banyak pihak dapat dilihat dari rincian data yang terkumpul di dinas pendidikan. Terdapatnya rincian data setiap tahunnya ini merupakan hasil bahwa pendataan yang dilakukan sudah berjalan. Untuk pertanggungjawaban pencairan dana bantuan pendidikan juga sudah baik dengan selalu ada laporan pertanggungjawaban setiap adanya pencairan dan syarat yang perlu dibawa agar dana tersebut dapat cair oleh setiap anak. Ini berfungsi agar tidak ada kecurangan dalam pencairan dana bantuan pendidikan tersebut.

i. Strategic Vision

Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro ini memiliki visi kedepan yang ingin dicapai yaitu wajib belajar 14 tahun bagi semua warga Bojonegoro. Dengan rata-rata lama sekolah masyarakat Bojonegoro yang masih sekitar 7,28 tahun, visi tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Namun ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan sudah mulai memikirkan pengembangan yang diinginkan dari masyarakat Bojonegoro kedepannya. Mereka menyadari bahwa yang diperlukan dalam pembangunan semacam ini adalah pendidikan untuk seluruh masyarakat. Dengan masyarakat Bojonegoro yang mengenyam pendidikan semakin tinggi maka diharapkan agar masyarakat memiliki daya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Tata Kelola Pendidikan dilihat dari perspektif Sound Governance

a. Proses

Elemen yang terlibat dalam Gerakan Ayo Sekolah ini sendiri meliputi berbagai pihak, diantaranya pemerintah kabupaten terutama dinas pendidikan, kecamatan, desa, dan masyarakat. Banyaknya pihak yang terlibat dalam Gerakan Ayo Sekolah ini membuat adanya suatu rangkaian interaksi antar elemen tersebut. Pada proses pendataan interaksi antar elemen selalu saling terhubung. Mulai dari pendataan dari desa yang melibatkan masyarakat, guru, dan perwakilan masing-masing RT tercipta interaksi antara elemen masyarakat dan desa. Data dari desa tersebut nantinya akan diserahkan ke kecamatan untuk direkap keseluruhan desa di kecamatan

tersebut, barulah data tersebut diserahkan ke dinas pendidikan. Dari dinas pendidikan data ini nanti akan ditindaklanjuti lebih jauh.

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses dari Gerakan Ayo Sekolah ini merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Antar elemen saling terikat dan memiliki kapasitas tertentu dalam Gerakan Ayo Sekolah. Apabila ada salah satu elemen tidak berjalan, maka pengelolaan Gerakan Ayo Sekolah ini juga tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan untuk elemen internasional juga masih berhubungan dengan Gerakan Ayo Sekolah ini, namun akan lebih dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

b. Struktur

Terkait dengan aktor yang terlibat dalam Gerakan Ayo Sekolah telah dijelaskan sebelumnya bahwa aktor yang terlibat diantaranya pemerintah kabupaten terutama dinas pendidikan, kecamatan, desa dan masyarakat serta elemen internasional. Aktor-aktor yang terlibat dalam Gerakan Ayo Sekolah ini merupakan bagian dari struktur governing baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dinas pendidikan merupakan perwakilan pemerintah daerah untuk menjalankan Gerakan Ayo Sekolah, sehingga struktur yang ada dalam dinas pendidikan juga masih termasuk dalam struktur di Gerakan Ayo Sekolah ini. Seluruh bagian dari dinas pendidikan tanpa terkecuali ikut terlibat dalam Gerakan Ayo Sekolah, dimana Kepala Dinas sebagai penanggungjawabnya. Selain melibatkan dinas pendidikan, Gerakan Ayo Sekolah ini juga melibatkan Bappeda.

c. Kognisi dan Nilai

Nilai-nilai normative seperti keadilan, kesetaraan, dan responsifitas telah dijelaskan secara detail dalam sub bab sebelumnya di tata kelola pendidikan dilihat dari *good governance*. Dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa nilai-nilai tersebut sudah dijalankan dengan baik. Semua warga Bojonegoro memiliki kesempatan yang sama dalam Gerakan Ayo Sekolah dan Gerakan Ayo Sekolah ini merupakan salah satu bentuk respon pemerintah bagi kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

Selain mengenai nilai-nilai normatif tersebut, terdapat upaya dalam internalisasi nilai yang juga dilihat dalam pengelolaan Gerakan Ayo Sekolah ini. Sebagai upaya internalisasi nilai dari Gerakan Ayo Sekolah, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sosialisasi bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah saja, namun juga dari pihak desa. Upaya lain dalam internalisasi nilai dilakukan dengan pendekatan personal.

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua sosialisasi yang diberikan sampai pada masyarakat. Masih banyak yang kurang mengetahui Gerakan Ayo Sekolah ini dan penerima sosialisasi hanya orang-orang tertentu. Kebanyakan sosialisasi dilakukan melalui kegiatan RT, namun tidak semua warga berkesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan RT. Sehingga internalisasi nilai melalui sosialisasi belum sepenuhnya terlaksana.

Sedangkan upaya lain yaitu dengan melakukan pendekatan personal pada anak-anak putus sekolah yang memang benar-benar menjadi sasaran adanya Gerakan Ayo Sekolah ini lebih menunjukkan hasil yang positif. Banyak anak yang setelah diberikan penjelasan melalui pendekatan personal tertarik untuk melanjutkan sekolah lagi. Maka dimensi kognisi dan nilai dalam Gerakan Ayo Sekolah masih kurang, terutama dalam upaya internalisasi nilai tersebut.

d. Konstitusi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Gerakan Ayo Sekolah berasal dari UUD 1945 pasal 31, Undang-undang Pendidikan Nasional, Perda Pendidikan serta Keputusan Bupati atau Edaran Bupati. Namun ketiganya masih belum dapat menjelaskan mengenai detail Perda maupun Keputusan Bupati yang membahas mengenai Gerakan Ayo Sekolah. Adapun perda yang akan membahas mengenai Gerakan Ayo Sekolah masih dalam tahap penyusunan. Sehingga ini membuat Gerakan Ayo Sekolah kurang memiliki kekuatan hukum yang jelas.

e. Organisasi dan Institusi

Organisasi dan institusi yang ada pada Gerakan Ayo Sekolah adalah dinas pendidikan dan dinas-dinas terkait. Karena walaupun secara teknis ini merupakan program dinas pendidikan namun juga dalam beberapa aspek dapat melibatkan dinas lain. Serta disebutkan bahwa adanya keterlibatan pihak kecamatan dan desa dalam proses pendataan. Ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di setiap desa.

Terkait dengan permasalahan yang ada pada organisasi terutama pada dinas pendidikan permasalahan lebih mengarah ke permasalahan internal yaitu dikarenakan jadwal yang sering berbenturan antara pegawai satu dengan yang lain. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi oleh pihak yang terlibat. Sedangkan untuk permasalahan yang lingkupnya lebih luas, penyelesaian masalahnya dibagi berdasarkan tingkatannya. Disebutkan bahwa apabila terdapat berbagai permasalahan tertentu akan diadakan rapat. Jika terjadi pada tingkat kabupaten maka rapat akan dihadiri oleh divisi yang bersangkutan

dan melibatkan pihak yang lain apabila memang diperlukan. Dan berbeda lagi apabila permasalahan tersebut terjadi pada tingkat kecamatan atau desa.

f. Manajemen dan Kinerja

Kinerja merupakan alat ukur utama untuk melihat kualitas manajemen suatu organisasi. Kinerja dapat pula dilihat dari pencapaian yang telah diperoleh organisasi selama ini, perlu dilihat tercapainya tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diinginkan dari Gerakan Ayo Sekolah adalah seluruh warga Bojonegoro dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dan tidak ada lagi anak putus sekolah. Terjadi perubahan jumlah anak yang tidak bersekolah yang ada di Bojonegoro. Dari yang awalnya data dari BPS 17.000 dan data yang diperoleh dinas pendidikan 10.000 kini menjadi sekitar 2.000. Jika dilihat dari data tersebut tentunya dapat dikatakan bahwa tujuan yang diharapkan sudah mulai tercapai. Antara data awal dengan akhir sudah banyak mengalami perubahan. Dengan begitu tentunya dapat menunjukkan bahwa masyarakat Bojonegoro semakin banyak yang mengenyam pendidikan. Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah peserta kejar paket A, paket B, dan paket C.

Meskipun belum sepenuhnya tercapai tujuan yang diharapkan dari Gerakan Ayo Sekolah ini, namun dengan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dapat dikatakan bahwa manajemen dan kinerja dalam Gerakan Ayo Sekolah ini sudah baik. Karena untuk mencapai tujuan diperlukan waktu secara bertahap, tidak bisa langsung tercapai dalam waktu singkat.

g. Kebijakan

Latar belakang adanya Gerakan Ayo Sekolah ini berasal dari Bupati, karena didukung data yang menunjukkan masih banyaknya anak yang tidak sekolah atau putus sekolah di Bojonegoro. Sehingga dapat dikatakan ini termasuk dalam kebijakan internal dimana ini sebagai panduan kepada peran mendefinisikan regulasi, prisedur, dan nilai untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Dimensi ini juga tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat dan upaya pemerintah untuk mendorongnya. Sudah sering dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat turut serta berperan dalam Gerakan Ayo Sekolah ini. Pemerintah juga berupaya mendorong partisipasi masyarakat agar semakin aktif untuk ikut terlibat didalamnya. Pemerintah desa juga berupaya dengan memberikan informasi melalui forum seperti musyawarah RT.

h. Sektor

Dimensi sektoral dari *sound governance* dikatakan penting karena difokuskan pada sektor

spesifik seperti industry, pertanian, desa, kota, ilmiah, penelitian dan pengembangan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan area lainnya. Koordinasi, kerjasama, dan pembagian informasi antar sektor dan organisasi dikatakan penting dalam *sound governance*.

Pada tata kelola ini perlu difokuskan pada satu sektor spesifik tertentu. Dalam Gerakan Ayo Sekolah yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bojonegoro difokuskan pada sektor pendidikan, yang dalam hal ini ditangani oleh dinas pendidikan. Meskipun sektor spesifik dalam Gerakan Ayo Sekolah adalah pendidikan, namun tidak bisa terlepas dengan sektor lain dalam pemerintahan.

i. Kekuatan internasional atau globalisasi

Pada Gerakan Ayo Sekolah elemen internasional yang ikut mempengaruhi adalah world bank dan adanya MEA. World bank sebagai salah satu lembaga internasional yang berpengaruh dalam Gerakan Ayo Sekolah memberikan masukan dan rekomendasi mengenai penanganan masalah pendidikan yang ada di Bojonegoro. Salah satunya adalah pembangunan SMA Trucuk yang merupakan rekomendasi dari world bank. Selain itu juga secara tidak langsung adanya MEA juga ikut mempengaruhi, dimana menuntut peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan daya saing. Sedangkan peningkatan kualitas SDM dan daya saing salah satunya melalui pendidikan.

j. Etika, Akuntabilitas dan Transparansi

Etika dalam pengelolaan pendidikan diperlukan agar dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi serta penyimpangan yang lain. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian didalam internalisasi etika itu sendiri. Terkait mengenai transparansi dalam Gerakan Ayo Sekolah ini, dinas pendidikan membuka informasi dan data-data yang mendukung melalui adanya website dinas pendidikan. Selain dinas pendidikan, akses informasi juga bisa didapatkan secara langsung dari desa. Desa sendiri juga memiliki papan monografi yang menunjukkan informasi umum dari desa dan juga terdapat poster yang berisi anggaran desa setiap tahunnya. Selain itu desa juga memiliki website yang bisa diakses oleh masyarakat. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa transparansi yang dilakukan sudah cukup baik

Selain transparansi, etika dalam pengelolaan pendidikan juga dikaitkan dengan akuntabilitas. Bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dinas pendidikan dalam Gerakan Ayo Sekolah ini berupa laporan rincian data yang didapka, yang mana menunjukkan bahwa pendataan yang dilakukan sudah berjalan.

Sedangkan pertanggungjawaban dalam hal anggaran lebih mengarah pada laporan pencairan dana bantuan pendidikan. Laporan ini secara rinci terdapat pada masing-masing desa, karena penyalurannya dilakukan lewat pihak desa. oleh karena itu secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dalam Gerakan Ayo Sekolah ini juga sudah cukup baik.

Kesimpulan

Pengelolaan Gerakan Ayo Sekolah dilihat dari perspektif *good governance* dijabarkan melalui beberapa prinsip yang ada dalam *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *effectiveness and efficiency*, *accountability* dan *strategic vision*. Gerakan Ayo Sekolah jika dilihat dari prinsip partisipasi, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *accountability*, *strategic vision* dapat dikatakan cukup baik. Namun jika dilihat dari prinsip *rule of law*, transparansi, dan *effectiveness and efficiency*. Prinsip *rule of law* Gerakan Ayo Sekolah kurang memiliki kekuatan hukum yang jelas, karena peraturan yang membahas mengenai Gerakan Ayo Sekolah secara detail masih dalam tahap penyusunan. Transparansi disini sudah bisa dikatakan baik terutama dalam hal kemudahan akses informasi, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal kelengkapan informasi. Dan jika dilihat dari prinsip *effectiveness and efficiency* secara umum masih kurang maksimal karena meskipun pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi sudah cukup baik namun tidak diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan petugas.

Sedangkan pengelolaan Gerakan Ayo Sekolah dilihat dari perspektif *sound governance* sudah dapat dikatakan baik jika dilihat dari dimensi proses, struktur, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, kekuatan internasional dan globalisasi dan etika. Namun masih perlu ditingkatkan pada dimensi kognisi dan nilai serta konstitusi. Pada dimensi kognisi dan nilai, nilai-nilai normatif seperti keadilan, kesetaraan, dan responsifitas sudah dijalankan dengan baik. Namun upaya internalisasi nilai dari Gerakan Ayo Sekolah ini masih tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pada dimensi konstitusi hampir sama dengan *rule of law* yang ada pada *good governance*, hasilnya juga sama saja yaitu sumber legitimasinya masuk kurang kuat. Selanjutnya organisasi dan institusi dari Gerakan Ayo Sekolah ini adalah dinas pendidikan dan dinas-dinas lain yang masih terkait.

Ada beberapa hal yang membedakan antara tata kelola yang dilihat dari *good governance* dan *sound governance*. Pada tata kelola yang menggunakan *good governance* cenderung kaku dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada didalamnya sedangkan pada *sound governance* cenderung lebih fleksibel.

Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017

Tidak ada ukuran pasti suatu pemerintahan dikatakan baik atau buruk, semua itu sifatnya kontekstual dan tergantung kondisi dari setiap organisasi. Selain itu adanya inovasi dalam *sound governance*. *Sound governance* memungkinkan adanya inovasi dengan didukung kompetensi sumber daya manusia. Dengan adanya pengaruh kekuatan internasional dan globalisasi maka akan menuntut pegawai atau aparat pemerintah menjadi semakin unggul. Misalnya unggul dalam menggunakan teknologi informasi, pengetahuan, mobilitas, komunikasi dan sebagainya

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan untuk mendukung keberhasilan Gerakan Ayo Sekolah yang ada di Bojonegoro berikut adalah saran yang dapat disampaikan peneliti :

1. Kelengkapan informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan terutama Gerakan Ayo Sekolah masih perlu ditingkatkan sehingga masyarakat lebih mudah untuk memperoleh informasi serta mengetahui tentang Gerakan Ayo Sekolah
2. Perlu peningkatan kemampuan pegawai atau aparatur terutama di desa dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya program pelatihan dan pengembangan.
3. Selain memberikan sosialisasi melalui forum-forum dan kegiatan RT juga perlu adanya pendekatan personal pada sasaran Gerakan Ayo Sekolah. Sebab tidak semua masyarakat mengetahui hanya melalui forum-forum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Angraini, Ristya Dwi. 2013. *Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*. Skripsi. Universitas Airlangga
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana. Surabaya. 2007. hlm 68
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press
- Domain, Tjahjanulin. 2011. *Sound governance*. Malang: UB Press
- Dwiyanto, Agus (ed). 2008. *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Farazmand, Ali. 2004. *Sound governance: Policy and Administrative Innovations*. Westport: Praeger Publishers

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. 2009. Jakarta: Erlangga

Putra, Fadillah. 2009. *Senjakala Good governance*. Malang: Averroes Press

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good governance*. Bandung: Refika Aditama

Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama

Suaedi, Falih dan Bintoro Wardiyanto (Ed). 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Surabaya: Graha Ilmu

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Widodo, Joko. 2001. *Good governance*. Surabaya: Insan Cendikia

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Website :

BPS Jawa Timur, www.jatimbps.go.id, diakses pada 28 April 2016

Dinas Pendidikan, www.dinaspendidikan.bojonegorokab.go.id, diakses pada 21 Mei 2017

Kabupaten Bojonegoro, www.bojonegorokab.go.id, diakses pada 21 Mei 2017

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). www.tnp2k.go.id, diakses pada 28 April 2016

UNDP. 2014. <http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>, diakses pada 28 April 2016

